

ISSN 2962-4045



Juli - September 2026
www.bapperidakotabogor.go.id
Instagram : @bapperida.kotabogor



SPARK YOUR IDEA: INNOVATION AND COLLABORATION EMPOWERING THE FUTURE



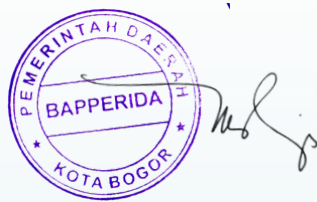
Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor bisa menyelesaikan penerbitan Buletin Pembangunan Daerah Vol.5 No.1. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Buletin Pembangunan Daerah ini merupakan edisi keempat yang diterbitkan sebagai sarana komunikasi dan publikasi informasi mengenai kegiatan pembangunan di Kota Bogor.

Akhirnya, kami mengharapkan semoga buletin ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor





Susunan Redaksi

PENGARAH

H. Denny Mulyadi, S.E.

PENANGGUNG JAWAB

Rudy Mashudi, S.T., MP

KETUA TIM REDAKSI

Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.SC.

TIM REDAKSI

Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si

Erni Solikhati, S.E.

Imam Santoso, S.E., M.M.

Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si.

Nani Haryani

Fajar Tri Utama

Rahma Meiza Hernanda

DESIGN

Syiva Multi Fani, S.Stat.

SEKRETARIAT

Dwi Hari Wibowo, S.Kom.

MITRA BESTARI

- Dr. Eko Sakapurnama (Universitas Indonesia)
- Dr. Eka Suhardi (Universitas Pakuan)
- Ifan Muttaqien, SP, MIT (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian)
- Mohamad Iksan Maolana, S.H., LL.M. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
- Sheila Savitri, S.Sos, M.AP (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)

<https://bapperida.kotabogor.go.id>



bapperida@kotabogor.go.id



[@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)

Daftar Isi

04

STUDI PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA MENEKAN RISIKO GAGALNYA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN DPPT KADALUARSA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA

Andri Santosa Putra, S.STP., MA. – Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor

08

VALIDITAS DPPT : KUNCI AKURASI ANGGARAN PENGADAAN TANAH

Andri Santosa Putra, S.STP., MA. – Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor

12

REVITALISASI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS SUARA WARGA : MENDORONG EFEKTIVITAS PROGRAM UMKM DAN JAMINAN KESEHATAN

Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. – Bapperida Kota Bogor

16

RUANG TUMBUH GENERASI KREATIF MENGOPTIMALKAN POTENSI ANAK MUDA BOGOR DI TENGAH DUKUNGAN SARANA PRASARANA KOTA

Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc. – Bapperida Kota Bogor

21

BOGOR INNOVATION AWARD 2026 : SPARK YOUR IDEA: INNOVATION AND COLLABORATION EMPOWERING THE FUTURE

Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. – Bapperida Kota Bogor

Studi Pendahuluan

Sebagai Upaya Menekan Risiko Gagalnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan DPPT Kadaluarsa yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian Negara

■ Penulis : Andri Santosa Putra, S.STP., MA. - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor



Pemanfaatan lahan untuk pembangunan jalan tol.

Mengacu ke Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 29 ayat (4), Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan. Ketentuan ini tentu harus dicermati oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah maupun Perangkat Daerah yang berwenang dalam penyusunan APBD bahwa sebelum waktu 2 (dua) tahun sejak DPPT ditetapkan habis, Pengadaan Tanah dimaksud harus sudah terlaksana.

Bahwa studi kelayakan maupun DPPT disusun dengan menggunakan Konsultan/ tenaga ahli yang dibayar menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Apabila DPPT yang sudah dibuat tersebut tidak dipergunakan sampai dengan habis masa berlakunya atau ka-

daluarsa, maka dikhawatirkan telah terjadi kerugian negara atau minimalnya adalah penggunaan uang APBD secara tidak efektif dan efisien.

Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah untuk mengantisipasi gagalnya pelaksanaan Pengadaan Tanah sampai dengan habisnya masa berlaku DPPT sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara, diantaranya dengan mewajibkan perangkat daerah melakukan Studi Pendahuluan secara mandiri sebelum mengajukan kebutuhan anggaran untuk pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Kata Kunci: Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, habis masa berlaku/kadaluarsa, konsultan/tenaga ahli, potensi kerugian negara, Studi Pendahuluan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029, rencana pembangunan di Kota Bogor ke depan sangat masif dan tentunya membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup besar, diantaranya:

- Pembangunan jalan R2 dengan total panjang 55 km, yang terbagi dalam 4 tahap (2026-2030);
- Pembangunan jalan R3 dengan total panjang lebih dari 3 km, terbagi dalam 4 tahap (2026-2029)
- Pembangunan jalan BIRR dengan total panjang 7 km, terbagi dalam 4 tahap (2027-2030)

Berdasarkan data dan informasi yang kami dapatkan dari Perangkat Daerah yang memerlukan tanah, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk beberapa proyek di atas sebenarnya sudah ada, namun sudah melewati masa berlaku 2 (dua) tahun sehingga harus diperbaharui, padahal pembuatan dokumen-dokumen tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Perangkat Daerah, beberapa penyebab kenapa DPPT sampai dengan habis masa berlakunya namun Pengadaan Tanahnya tidak/ gagal terlaksana, diantaranya :

1. Terdapat penolakan oleh Pihak yang Berhak atau masyarakat yang terdampak terhadap rencana pembangunan dan/atau nilai ganti kerugian;
2. Terdapat kepemilikan tanah yang masih tumpang tindih atau dalam kondisi sengketa;
3. Perubahan/ pergeseran pada kebijakan prioritas pembangunan. Hal ini seringkali terjadi ketika pergantian pimpinan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Kebijakan efisiensi anggaran, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Ketika ini terjadi, seringkali diambil jalan yang paling mudah yaitu menunda kegiatan yang membutuhkan anggaran besar, diantaranya pengadaan tanah.

Pemanfaatan lahan untuk pembangunan jalan tol. (Sumber: canva.com)



ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif Kebijakan	Deskripsi Singkat	Manfaat yang Diharapkan
Alternatif 1: Mengoptimalkan pelaksanaan studi kelayakan oleh konsultan	Poin-poin yang diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa membuat pengadaan gagal terlaksana dapat dimuat di studi kelayakan	Perangkat daerah cukup mengandalkan konsultan, namun tentu konsultan harus dibayar apapun kondisi yang ditemukan di lapangan
Alternatif 2: Mewajibkan perangkat daerah melaksanakan Studi Pendahuluan sebelum mengajukan anggaran untuk pembuatan dokumen perencanaan	Perangkat daerah melaksanakan studi pendahuluan sebelum mengajukan anggaran untuk pembuatan dokumen perencanaan (studi kelayakan dan DPPT)	Hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan pengadaan tanah bisa dideteksi dan diantisipasi

REKOMENDASI

Dalam rangka memastikan metode Pengadaan Tanah yang paling tepat serta pemetaan potensi permasalahan di lapangan, kami merekomendasikan Alternatif 2 agar hal-hal yang berpotensi menyebabkan kegagalan pengadaan tanah dapat diketahui dan diantisipasi lebih awal, sekaligus mencegah anggaran pemerintah daerah terbuang karena pembuatan dokumen perencanaan yang sampai dengan habis masa berlakunya namun pengadaan tanah tidak terlaksana.

Kegiatan pemetaan potensi permasalahan di lapangan terkait metode Pengadaan Tanah.



TINDAKAN KUNCI (KEY ACTION)

1. Mewajibkan Perangkat Daerah yang memerlukan tanah untuk melaksanakan STUDI PENDAHULUAN yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu menggunakan jasa konsultan, dengan muatan diantaranya :
 - Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - Kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Daerah;
 - Penjelasan urgensi dan skala prioritas rencana pembangunan;
 - Identifikasi Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terdampak untuk mengantisipasi permasalahan pada kepemilikan tanah;
 - Pemetaan dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan, untuk mengantisipasi risiko adanya penolakan;
 - Identifikasi kendala dan permasalahan-permasalahan lain yang mungkin terjadi di lapangan; dan
 - Informasi terkait referensi ganti kerugian yang diinginkan masyarakat.
2. Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada poin (2) dituangkan dalam bentuk proposal dan disampaikan ketika pengajuan anggaran untuk Perencanaan Pengadaan Tanah (penyusunan Studi Kelayakan dan DPPT) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
3. Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dalam melakukan perencanaan Pengadaan Tanah agar memaksimalkan peran dan fungsi Tim Penyusun DPPT, baik Tim Utama maupun Tim Pendamping sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021;
4. Dalam hal Perencanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanahan (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bogor), maka Perangkat Daerah yang memerlukan tanah menyampaikan Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Poin (2) kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanahan sebagai dasar pengajuan anggaran Perencanaan Pengadaan Tanah kepada TAPD.

5. Muatan Studi Pendahuluan ini dapat disadur ke dalam DPPT oleh Tim Penyusun, sedangkan untuk muatan terkait penganggaran agar lebih akurat disarankan untuk menggunakan KJPP atau Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi Penilai Publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031; dan
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Validitas DPPT: Kunci Akurasi Anggaran Pengadaan Tanah

■ Penulis : Andri Santosa Putra, S.STP., MA,
- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor

DPPT memuat perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran yang menentukan kesiapan pembiayaan Pengadaan Tanah. Selama ini penyusunan DPPT umumnya menggunakan konsultan yang belum tentu memiliki kompetensi khusus di bidang Penilaian Tanah. Hal ini memunculkan risiko kekurangan anggaran Pengadaan Tanah pada tahap pelaksanaan, bahkan lebih jauh bisa menjadi risiko hukum.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk optimalisasi peran internal Pemerintah Daerah dan penggunaan Konsultan Jasa Penilai Publik/Pertanahan dalam menyusun Perkiraan Nilai Tanah pada DPPT.

PENDAHULUAN

Perkiraan nilai tanah merupakan komponen strategis dalam DPPT karena menjadi salah satu dasar untuk memperkirakan kebutuhan Ganti Kerugian dan kebutuhan anggaran. Namun demikian, penyusunan DPPT selama ini pada umumnya dilaksanakan oleh konsultan penyusun dokumen perencanaan yang tidak seluruhnya memiliki kompetensi profesional khusus dalam bidang Penilaian Tanah.

Dalam praktiknya, perkiraan nilai tanah dapat diperoleh melalui survei harga atau pengumpulan data pasar. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran indikatif, namun belum tentu melalui proses penilaian profesional yang mencakup verifikasi data, analisis karakteristik objek, penyesuaian data pembandingan, dan penerapan metodologi penilaian.

DESKRIPSI MASALAH

Perkiraan nilai tanah merupakan salah satu dasar perencanaan kebutuhan Ganti Kerugian dan penganggaran. Ketidakakuratan nilai dapat menimbulkan kekurangan anggaran, penyesuaian APBD, keterlambatan pembayaran Ganti Kerugian, dan pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan.

Perkiraan Nilai Kurang Akurat → Anggaran Tidak Sesuai → Kekurangan/Penyesuaian Anggaran → Pengadaan Tanah Tertunda → Pembangunan Terlambat

Konsultan penyusun DPPT umumnya memiliki kompetensi perencanaan, studi kelayakan, survei, dan tata ruang. Namun kompetensi dalam menyusun dokumen perencanaan tidak selalu sama dengan kompetensi profesional dalam melakukan penilaian tanah. Perkiraan nilai sering diperoleh melalui survei atau informasi harga pasar yang belum tentu melalui verifikasi data, analisis pembandingan, penyesuaian karakteristik objek, dan metodologi penilaian yang memadai. Contoh kasus adalah proses Pengadaan Tanah untuk Kelurahan Situgede pada tahun 2025 dimana perkiraan nilai tanah yang tercantum pada DPPT lebih kecil dari nilai appraisal pada tahap Pelaksanaan sehingga Kecamatan Bogor Barat sebagai pelaksana kegiatan harus mengajukan penambahan anggaran pada Perubahan APBD tahun 2025.

ANALISIS RISIKO

- Risiko fiskal: pagu awal tidak mencukupi sehingga diperlukan penyesuaian anggaran.
- Risiko proses: perbedaan antara estimasi awal, appraisal, dan hasil negosiasi perlu dijelaskan secara konsisten dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan.
- Risiko akuntabilitas: semakin besar perbedaan antar-tahap, semakin penting dokumentasi mengenai metode estimasi, dasar penilaian, proses negosiasi, dan dasar penetapan nilai.
- Risiko hukum ditempatkan sebagai bagian dari risiko akuntabilitas yang perlu dimitigasi melalui penguatan bukti dan proses.

Dokumen/indikator	Nilai	Keterangan
Nilai Pengadaan Tanah pada DPA TA 2025	Rp6.237.700.000	Pagu awal; $2.660 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.345.000/\text{m}^2$
Nilai Appraisal	Rp7.199.093.000	Hasil penilaian tanah
Hasil negosiasi	Rp6.900.040.000	Nilai yang diminta untuk dianggarkan/dibayar
Selisih terhadap DPA	Rp662.340.000	Kebutuhan tambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025

OPSI KEBIJAKAN

Opsi	Model	Kelebihan	Kekurangan
1	Status quo: seluruh DPPT oleh konsultan	Pelaksanaan berjalan seperti biasa	Perkiraan nilai tanah diragukan validitasnya
2	Konsultan DPPT + tenaga ahli Penilai	Mudah, hanya perlu menambahkan persyaratan dalam KAK; kualitas perkiraan nilai tanah meningkat	Risiko formalitas; keterlibatan ahli sulit dipastikan (bisa saja hanya pasang nama); independensi kurang karena berada di bawah konsultan utama
3	Tim Internal + Penilai Profesional	Perkiraan nilai tanah valid dan pertanggung jawabannya jelas	Perlu peningkatan kompetensi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan (Studi Pendahuluan dan DPPT) karena sebelumnya semua dikerjakan oleh konsultan

PERBANDINGAN OPSI

Aspek	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 3
Kualitas/ ketepatan perkiraan nilai	Rendah-sedang	Sedang-tinggi	Tinggi
Kejelasan tanggung jawab	Rendah	Sedang	Tinggi
Independensi penilaian	Rendah	Sedang	Tinggi
Kebutuhan biaya	Rendah	Sedang	Tinggi
Kesiapan SDM Pemerintah Daerah	Rendah	Rendah	Sedang-Tinggi
Kemudahan penerapan	Mudah	Mudah	Lebih Kompleks

Ilustrasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah. (Sumber: canva.com)



REKOMENDASI : OPSI 3

DPPT disusun oleh Tim Penyusunan DPPT Pemerintah Kota Bogor dengan mengoptimalkan data, pengetahuan, dan kewenangan perangkat daerah yang sebagian sudah terangkum sebelumnya dalam Studi Pendahuluan. Untuk muatan yang memerlukan kompetensi profesional khusus terutama perkiraan nilai tanah, Pemerintah Daerah menggunakan Konsultan Jasa Penilai Publik/ Pertanahan sebagai bagian dari Tim Penyusunan DPPT.

TINDAKAN KUNCI (KEY ACTION)

1. Menyusun regulasi pengadaan tanah yang menjadi dasar bagi;
2. Pelaksanaan Studi Pendahuluan sebelum menyusun DPPT;
3. Penggunaan konsultan jasa Penilai Publik/ Pertanahan dalam penyusunan DPPT;
4. Pembuatan SOP dan tata kerja penyusunan DPPT.
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Penyusunan DPPT lintas perangkat daerah sesuai dengan regulasi;
6. Melakukan evaluasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. DPA Kecamatan Bogor Barat APBD TA 2025;
4. DPA Kecamatan Bogor Barat Perubahan APBD TA 2025;
5. Surat Camat Bogor Barat Nomor: 000.7.2.3/706-Umpep tanggal 15 Juli 2025 perihal Permohonan Penambahan Anggaran, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Kegiatan merencanakan pembangunan tanah. (Sumber: canva.com)





Revitalisasi Kebijakan Publik Berbasis Suara Warga

Mendorong Efektivitas Program UMKM dan Jaminan Kesehatan

■ Penulis : Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si.
- Bapperida Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor telah mengambil langkah progresif dengan mengimplementasikan Program Review pada April 2026, sebuah metode evaluasi kebijakan yang berpusat pada partisipasi langsung masyarakat untuk meninjau efisiensi dan dampak program. Evaluasi terhadap dua program kunci Pelatihan UMKM dan PBI Jaminan Kesehatan Pemda menunjukkan bahwa meskipun kedua program sangat diapresiasi, mayoritas warga dan evaluator menilai keduanya "perlu diperbaiki". Masalah Utama: Kurangnya keberlanjutan program (pendampingan pasca-pelatihan UMKM) dan ketidakakuratan data (PBI Kesehatan) yang memicu isu ketepatan sasaran dan kualitas pelayanan. Tindakan yang Diusulkan: Mereformasi tata kelola data melalui integrasi sistem antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memformalkan mekanisme pendampingan berkelanjutan untuk UMKM, dan meningkatkan transparansi data penerima manfaat PBI di tingkat RT/RW untuk mewujudkan koreksi sosial. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan Dampak Nyata dan memperkuat Kepercayaan Publik.

Kata Kunci : program, review, kebijakan, evaluasi, partisipasi

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan modern menuntut akuntabilitas dan efisiensi anggaran yang tinggi. Kota Bogor merespons tuntutan ini dengan mengadopsi Program Review replikasi dari konsep Sortir Program yang dipelopori oleh lembaga pemikir Jepang, Koso Nippon. Metode ini mengedepankan evaluasi partisipatif, di mana warga bertindak sebagai "hakim" yang menilai kelayakan sebuah program untuk dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 8 April 2026 di Balai Kota Bogor ini merupakan yang pertama di Kota Bogor dengan dukungan pendanaan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri. Program yang dipilih untuk ditinjau adalah Program Pelatihan UMKM (Dinas KUKMDagin) dan Program PBI Jaminan Kesehatan Pemda (Dinas Kesehatan), keduanya merupakan program rutin beranggaran besar dan berdampak signifikan bagi masyarakat.

DESKRIPSI MASALAH DAN ANALISIS

Berdasarkan rekapitulasi penilaian dari 30 warga penilai dan evaluator ahli, ditemukan poin-poin kritis pada kedua program yang memerlukan perbaikan segera:

A. Program Pelatihan UMKM (Dinas KUKMDagin)

Meskipun program ini berhasil meningkatkan kapasitas, manfaatnya terhenti di tengah jalan karena kelemahan operasional:

- Tidak Adanya Keberlanjutan (Pendampingan): Pelatihan bersifat seremonial dan terhenti setelah sesi di kelas. Evaluator dan warga menekankan perlunya pendampingan dan monitoring intensif selama 3-6 bulan pasca-pelatihan untuk mengukur progres nyata seperti peningkatan omset dan status "naik kelas" UMKM.
- Kesenjangan Digital dan Jangkauan: Program cenderung hanya menyentuh pelaku UMKM yang sudah melek digital. Masih banyak pelaku usaha kecil (kalangan bawah) yang belum terjamah karena kurangnya sosialisasi langsung di tingkat bawah dan keterbatasan aksesibilitas digital.
- Fragmentasi Data: Disarankan adanya Basis Data UMKM Tunggal yang dapat digunakan bersama oleh seluruh OPD, sehingga program peningkatan kapasitas dapat dilakukan secara terintegrasi dan optimal (dikeroyok).

B. Program PBI Jaminan Kesehatan Pemda (Dinas Kesehatan)

Program ini vital untuk warga miskin, namun akurasi data menjadi tantangan terbesar:

- Akurasi dan Transparansi Data Sasaran: Warga menilai validasi data penerima bantuan masih bermasalah, menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran atau menonaktifkan kepesertaan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi memadai.
- Kualitas Pelayanan yang Berbeda: Ditemukan adanya keluhan mengenai perbedaan perlakuan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) antara pasien PBI dan pasien umum/tunai, serta proses pengurusan Universal Health Coverage (UHC) yang "terlalu ribet".
- Kurangnya Sosialisasi Kriteria: Masyarakat masih kebingungan dengan kriteria kelayakan, seperti status "Desil" (kelas sosial). Diperlukan kolaborasi optimal antara Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan pihak kelurahan untuk sosialisasi dan validasi.

Pelaksanaan kegiatan Program Review.



OPSI KEBIJAKAN

Terdapat tiga opsi kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Bogor untuk merespons hasil Program Review:

Opsi Kebijakan	Deskripsi Singkat	Manfaat yang Diharapkan
Opsi 1: Status Quo dengan Perbaikan Administratif Minor	Melanjutkan program tanpa perubahan substansial pada struktur atau anggaran. Perbaikan hanya difokuskan pada peningkatan kinerja operasional internal OPD (misalnya, membuat SOP baru).	Biaya rendah, implementasi cepat, namun risiko masalah utama (akurasi data dan keberlanjutan) akan berulang.
Opsi 2: Perbaikan Terfokus dan Quick Wins	Melakukan perbaikan cepat dan terpisah: membersihkan data PBI saat ini dan menambahkan klausul pendampingan UMKM. Tidak ada integrasi data atau mekanisme koreksi sosial formal.	Menyelesaikan masalah mendesak jangka pendek, namun tidak mengatasi akar masalah pada tata kelola data antar-lembaga.
Opsi 3: Reformasi Sistemik Berbasis Evidence-Based Policy	Menerapkan integrasi sistem data UMKM dan PBI; merealokasi anggaran untuk pengawasan dan pendampingan pasca-program; serta melembagakan mekanisme partisipasi publik dalam koreksi data. (Opsi yang Direkomendasikan)	Menciptakan efisiensi anggaran jangka panjang, meningkatkan akurasi data, memperkuat kepercayaan publik, dan mencapai pelayanan yang people-centered development.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kami merekomendasikan Opsi 3 (Reformasi Sistemik) untuk memastikan kedua program mencapai efektivitas maksimal dan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Review Program.



TINDAKAN KUNCI (KEY ACTIONS):**1. Perbaikan Tata Kelola Data dan Transparansi (UMKM & PBI)**

- Integrasi Data Tunggal: Segera bangun dan wajibkan penggunaan Basis Data UMKM Tunggal oleh Dinas KUKMDagin dan seluruh OPD terkait. Hal ini penting agar program peningkatan kapasitas dapat dikeroyok bersama secara terpadu.
- Mekanisme Koreksi Sosial PBI: Terapkan usulan untuk menerbitkan daftar penerima PBI Jaminan Kesehatan di tingkat RT/RW (sesuai regulasi yang berlaku) sebagai bentuk transparansi dan koreksi sosial. Langkah ini memitigasi risiko gejolak sosial dan memastikan validasi data dilakukan oleh warga yang paling tahu.
- Sosialisasi Kriteria: Lakukan sosialisasi masif dan mudah dipahami, melibatkan aparat wilayah (Kecamatan dan Kelurahan) mengenai penentuan status "Desil" dan penggunaan aplikasi pendukung (seperti SOLID).

2. Memastikan Keberlanjutan Program (UMKM)

- Wajib Pendampingan Lanjutan: Alokasikan anggaran yang memadai untuk Pendampingan Pasca-Pelatihan minimal 3-6 bulan. Program harus fokus pada kualitas pendampingan, bukan hanya jumlah peserta, dengan indikator terukur (peningkatan omset, UMKM naik kelas, usaha bertahan >1 tahun).
- Jangkauan Non-Digital: Bentuk tim investigasi lapangan untuk secara proaktif menjangkau dan mengakomodir pelaku UMKM yang belum terjamah program karena keterbatasan literasi digital.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan PBI dan Kapasitas Aparat

- Standar Pelayanan Setara: Dinas Kesehatan wajib mengkoordinasikan dan menetapkan standar operasional baku (SOP) dengan faskes agar tidak terjadi perbedaan pelayanan antara pasien PBI dan pasien umum/tunai.
- Penyederhanaan Proses: Permudah proses pengaktifan BPJS dan prosedur UHC agar tidak "terlalu ribet" bagi masyarakat, memotong birokrasi yang memakan waktu (misalnya, menunggu 1x24 jam).

- Kapasitas Aparat: Mendorong dinas pengampu (Dinas KUKMDagin dan Dinas Kesehatan) untuk meningkatkan transparansi dan mampu menjelaskan program dengan bahasa yang mudah dipahami warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. (2005). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta: Pustaka Cakra
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- BAPPENAS. (2014). Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Koso Nippon. (n.d.). Global Expansion (Program Review in Indonesia). Diakses dari <https://www.kosonippon.org/en/about/global-expansion.html>
- Tifa Foundation. (2020, December 22). Pendekatan Evaluasi Program yang Mengubah Tata Kelola Pembangunan Jepang. Diakses dari <https://tifafoundation.id/artikel/program-review-pendekatan-evaluasi-program-yang-mengubah-tata-kelola-pembangunan-jepang/>

Ruang Tumbuh Generasi Kreatif

Mengoptimalkan Potensi Anak Muda Bogor di Tengah Dukungan Sarana Prasarana Kota

Penulis : Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc. - Bapperida Kota Bogor



Kebun Raya Kota Bogor. (Sumber: canva.com)

Kota Bogor tidak hanya dikenal sebagai kota hujan dengan lanskap alam yang sejuk dan warisan botani dunia.

Di balik pesona kulturalnya, Bogor menyimpan energi besar yang digerakkan oleh kelompok usia muda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan visualisasi demografi daerah, kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi struktur penduduk Kota Bogor dengan porsi mencapai lebih dari 70 persen, di mana kelompok usia remaja hingga dewasa muda menjadi motor penggerak utama dinamika sosial ekonomi kota.

Potensi demografi ini merupakan aset berharga yang harus dikelola dengan serius. Pertanyaannya, bagaimana kita memastikan bahwa gelombang energi kreativitas dan inovasi anak muda ini terwadahi dengan baik melalui ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) di Kota Bogor?

POTRET DEMOGRAFI: KETIKA ENERGI MUDA BERTEMU PELUANG ZAMAN

Merujuk pada data BPS, struktur penduduk Kota Bogor didominasi oleh generasi muda yang lekat dengan teknologi, mobilitas tinggi, dan pola pikir kreatif. Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang tinggi serta masuknya Kota Bogor dalam ekosistem aglomerasi perkotaan menuntut adanya ruang-ruang publik yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Anak muda hari ini tidak lagi melihat kota sekadar tempat tinggal, melainkan sebagai kanvas tempat mereka mengekspresikan gagasan, merintis usaha rintisan (startup), mengembangkan komunitas seni, hingga menciptakan inovasi sosial. Namun, kreativitas membutuhkan ruang hidup agar tidak layu sebelum berkembang. Di sinilah pentingnya ketersediaan infrastruktur fisik dan non-fisik yang inklusif.

PETA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KREATIVITAS DI KOTA BOGOR

Pemerintah Kota Bogor bersama para pemangku kepentingan terus berbenah menyediakan infrastruktur yang ramah kreativitas pemuda. Beberapa sarana dan prasarana kunci yang tersedia meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Tematik: Keberadaan berbagai taman kota seperti Taman Sempur, Alun-Alun Kota Bogor, hingga pedestrian Kebun Raya Bogor tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi telah bertransformasi menjadi ruang komunal gratis bagi anak muda untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan menggelar pertunjukan seni jalanan atau pameran mini.
2. Gedung Olah Raga Masyarakat : Keberadaan Gedung Olah Raga / Lapangan Olahraga yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kota Bogor, memudahkan masyarakat, khususnya anak muda dalam mengekspresikan minat dan bakatnya di bidang olahraga, yang diharapkan juga dapat mendorong peningkatan prestasi dan derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Pusat Kreatif dan Ruang Kolaborasi (Creative Hub): Kehadiran ruang-ruang publik kreatif yang diinisiasi oleh pemerintah maupun sektor swasta dan komunitas memberikan akses bagi anak muda untuk memanfaatkan fasilitas kerja bersama (coworking space), pelatihan digital, dan inkubasi bisnis tanpa harus merogoh kocek dalam.
4. Infrastruktur Digital dan Smart City: Dengan jangkauan internet yang semakin merata dan ekosistem smart city yang dikembangkan pemerintah daerah, akses informasi, literasi digital, serta pemasaran produk kreatif UMKM muda menjadi jauh lebih terbuka.
5. Kawasan Pendidikan dan Kampus Strategis: Keberadaan institusi pendidikan tinggi terkemuka seperti IPB University dan perguruan tinggi lainnya di sekitar Bogor menjadi magnet pengetahuan. Hal ini memperkuat ekosistem riset melalui kolaborasi hexa-helix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan agregator).



Taman Sempur Kota Bogor. (Sumber: antaranews.com)



Gor Olahraga Kota Bogor. (Sumber: antaranews.com)



UMKM Kota Bogor. (Sumber: antaranews.com)

KEGIATAN KREATIF YANG TELAH BERJALAN DI KOTA BOGOR

Berikut adalah beberapa contoh kegiatan dan ajang kreatif di Kota Bogor yang telah berjalan dan melibatkan partisipasi aktif generasi muda dalam kurun waktu tiga tahun terakhir :

1. Bogor Innovation Award (BIA), merupakan ajang kompetisi inovasi tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk menjaring ide-ide kreatif dan solutif dari berbagai kalangan
2. Inisiatif Ekonomi Kreatif dan Jejaring “REKA Bogor” (Rekaloka) merupakan wadah ekosistem dan simpul kolaborasi para pelaku ekonomi kreatif di Bogor yang aktif menggerakkan peta jalan sektor kreatif (mulai dari kuliner, fesyen, kriya, seni pertunjukan dan desain komunikasi visual)
3. Bogor ICMi Islamic Festival (BIIFEST) merupakan festival kreatif berbasis kebudayaan dan religi yang diselenggarakan oleh ICMi setiap tahun.
4. Bogor Cultural Fest merupakan rangkaian festival seni dan budaya yang diinisiasi dan dilaksanakan di berbagai pusat public atau ruang kreatif di Kota Bogor

TANTANGAN DAN PEKERJAAN RUMAH BERSAMA

Ikendati sarana dan prasarana publik terus berkembang, masih terdapat tantangan nyata yang perlu dijawab bersama:

1. Distribusi Akses: Sebagian besar pusat kreativitas dan ruang publik modern masih terkonsentrasi di pusat kota, sementara anak muda di wilayah pinggiran Kota Bogor memerlukan akses fasilitas penunjang yang setara.
2. Keterlibatan Aktif (Co-Creation): Sarana fisik yang dibangun pemerintah harus dikelola dengan melibatkan langsung anak muda sebagai pengguna utama (user-centric design), agar fasilitas tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan zaman dan tidak mangkrak.
3. Komersialisasi dan Keberlanjutan Inovasi: Fasilitas fisik berupa tempat berkumpul harus diimbangi dengan akses permodalan, pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta jalur hilirisasi produk inovasi agar kreativitas anak muda berbuah kesejahteraan ekonomi.

MENYONGSONG MASA DEPAN: BOGOR SEBAGAI KOTA SAINS KREATIF

Visi Kota Bogor tahun 2045 Adalah Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2025 – 2045. Kreativitas tanpa ruang adalah angan-angan, tetapi ruang tanpa pelibatan generasi kreatif adalah kesia-siaan. Dengan data BPS yang menunjukkan dominasi usia produktif, Kota Bogor memiliki momentum emas (window of opportunity) untuk memantapkan posisinya sebagai kota yang ramah talenta muda. Melalui sinergi program seperti penyusunan Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Iptek Daerah (RIPJPID), rutinitas diskursus publik seperti forum Thinklab Bapperida, serta optimalisasi taman dan ruang kreatif, Kota Bogor sedang merajut masa depannya. Sudah saatnya anak muda Bogor tidak hanya menjadi penonton di kota sendiri, tetapi menjadi arsitek utama yang merancang solusi, menelurkan inovasi, dan membawa nama Bogor terbang tinggi di kancah nasional maupun global.

Bagaimana pandangan Anda, sudahkah ruang-ruang kreatif di sekitar lingkungan Anda di Kota Bogor memfasilitasi ide-ide cemerlang Anda selama ini?

Bogor Cultural Fest. (Sumber: antaranews.com)





JULUKAN KOTA HUJAN

DAN REKOR PETIR

Bogor terkenal dengan julukan Kota Hujan. Mengapa? Karena letaknya yang dikelilingi oleh Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango membuat udara lembap mudah mengembun menjadi hujan.

Fakta Unik: Bogor pernah tercatat dalam Guinness Book of World Records sebagai salah satu kota dengan frekuensi petir paling tinggi di dunia, mencapai rata-rata 322 kali gemuruh petir dalam setahun!



BOGOR INNOVATION
2026

BOGOR INNOVATION AWARD 2026

Spark Your Idea: Innovation and Collaboration
Empowering The Future

■ Penulis : Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si.,
- Ketua Tim Kerja BIA 2026 (BAPPERIDA Kota Bogor)

BOGOR INNOVATION AWARD
2026

JUARA 1

Kategori Pelajar SMA/SMK/MA

Rp 10.000.000,-



BOGOR INNOVATION AWARD
2026

JUARA 1

Kategori Pelajar SMP/MTs

Rp 10.000.000,-

BOGOR INNOVATION AWARD
2026

JUARA 3

Kategori Pelajar SMP/MTs

Rp 5.000.000,-

Mota Bogor adalah kota ide. Kota dengan kampus, komunitas, startup, sanggar, dan birokrasi yang tidak pernah berhenti mencari cara baru untuk melayani warganya. Semangat itulah yang coba dirangkai Pemerintah Kota Bogor melalui Bogor Innovation Award (BIA) 2026.

Bukan sekadar lomba. BIA adalah ekosistem, tempat pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat bertemu, berkolaborasi, dan memastikan satu hal: inovasi tidak berhenti sebagai prototype di gudang, tapi hidup dan dipakai warga.

Tahun ini BIA mengusung tema besar: **“SPARK YOUR IDEA: Innovation and Collaboration Empowering The Future”**. Tema yang menegaskan bahwa inovasi lahir dari ide kecil yang disulut, lalu dibesarkan bersama-sama.

BAB 1: AWAL PERJALANAN - KICK OFF 8 APRIL 2026

Perjalanan BIA 2026 dimulai jauh sebelum panggung festival berdiri. Tepat pada 8 April 2026, di IPB International Convention Center (IICC), BIA 2026 resmi di-kick off oleh Wali Kota Bogor, Dr. H. Dedie A. Rachim, M.A.

Kick off ini tidak digelar sendiri, dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang RKPD Kota Bogor Tahun 2027. Pesannya simbolis dan strategis: inovasi harus menjadi nadi perencanaan pembangunan kota.

Hadir lebih dari 300 peserta. Dari Kepala OPD se-Kota Bogor, DPRD, TNI-Polri, Kejaksaan, Bank Indonesia, BPS, Rektor IPB dan Universitas Pakuan, KADIN, PHRI, hingga perwakilan komunitas kreatif dan pelajar.

Di forum itu, Wali Kota menegaskan visi transformasi digital dan pentingnya Indeks Inovasi Daerah sebagai cermin daya saing kota. Kepala BAPPERIDA Kota Bogor saat itu, Rudy Mashudi, dalam laporannya menyampaikan bahwa BIA 2026 adalah BIA ke-8 dan menjadi yang terbesar dari segi partisipasi.

Sistem pendaftaran dibuat lebih mudah melalui portal digital BIA dan dibuka untuk lima kategori utama: Pelajar SMP/MTs/ sederajat, Pelajar SMA/SMK/MA/ sederajat, Perguruan Tinggi/Lembaga/ Pelaku Usaha, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Masyarakat.

Targetnya jelas: menjaring inovasi yang solutif, replikatif, dan berdampak langsung.

Pembukaan Festival Inovasi BIA 2026 di Musrenbang Kota Bogor. (Sumber: Radar Bogor)



BAB 2: LEDAKAN ANIMO DAN PROSES SELEKSI

Apa yang terjadi setelah kick off melampaui ekspektasi. Hingga penutupan pendaftaran lomba inovasi BIA pada Juni 2026, tercatat 373 inovasi mendaftar. Angka ini naik lebih dari 62% dibanding tahun 2025 yang hanya 230 inovasi. Ini bukti bahwa budaya inovasi di Kota Bogor tumbuh.

Panitia melakukan seleksi administrasi, kemudian dilakukan seleksi substansi oleh Tim Juri yang terdiri dari BSKDN Kemendagri, BRIN, akademisi IPB, praktisi media dan perwakilan dari Pemerintah Kota Bogor dan hasilnya, 184 inovasi dinyatakan lolos untuk masuk ke tahap pembinaan.

Rinciannya: kategori pelajar menjadi penyumbang terbesar dengan ide-ide teknologi ramah lingkungan, disusul kategori perguruan tinggi/lembaga/pelaku usaha dengan inovasi digital dan ekonomi kreatif, kategori ASN dengan inovasi pelayanan publik, dan kategori masyarakat dengan inovasi sosial dan lingkungan yang sangat kontekstual.

Kegiatan seleksi administrasi.



Kegiatan validasi lapangan.

BAB 3: VALIDASI LAPANGAN – KESESUAIAN DAN KEABSAHAN INOVASI

Tujuan lugasnya 4 hal:

1. Cek Fakta, Bukan Cek Kertas: Apakah inovasi yang ditulis di proposal benar-benar ada, jalan, dan dipakai di lapangan? Bukan cuma ide di atas kertas.
2. Cek Manfaat Nyata: Apakah inovasi itu benar-benar menyelesaikan masalah warga Bogor? Ada dampaknya atau tidak?
3. Cek Kelayakan Hilirisasi: Dari 373 pendaftar dan 184 inovasi yang terjaring 2026, mana yang layak jadi 10 Pilot Project di Perangkat Daerah. Tim juri turun langsung lihat apakah siap direplikasi.
4. Cek Keaslian: Memastikan inovasi itu karya sendiri, bukan copas, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Jadi, jika Seleksi Administrasi mengecek kelengkapan dokumen, Seleksi Substansi mengecek kualitas ide oleh juri, maka Validasi Lapangan adalah mengecek kebenaran di lokasi. Diharapkan BIA tidak berhenti sebagai piala, tapi jadi solusi yang benar-benar dipakai Pemerintah Kota Bogor.

BAB 4: PRESENTASI DAN WAWANCARA – SAATNYA IDE BERBICARA

Perjalanan para peserta BIA 2026 masuk ke tahap yang paling menentukan: presentasi dan wawancara di hadapan dewan juri. Di tahap ini, proposal dan inovasi tidak lagi hanya berbicara melalui dokumen. Peserta harus berdiri di depan para juri, menjelaskan gagasannya, menunjukkan cara kerja inovasinya, sekaligus menjawab pertanyaan tentang manfaat, keberlanjutan, dan kemungkinan inovasi tersebut untuk dikembangkan lebih luas.

Peserta ditantang bukan hanya untuk menunjukkan bahwa inovasinya menarik, tetapi juga mampu menjelaskan: masalah apa yang diselesaikan, siapa yang merasakan manfaatnya, apa bukti dampaknya, dan sejauh mana inovasi tersebut siap diterapkan atau direplikasi.

Karena di BIA, inovasi bukan sekadar tentang siapa yang punya ide paling cemerlang. Tetapi siapa yang mampu membuat ide itu dipahami, dipercaya, dikembangkan, dan digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Kegiatan presentasi dan wawancara.



BAB 4: PUNCAK ACARA - FESTIVAL INOVASI 8-9 SEPTEMBER 2026

Puncak perjalanan itu adalah Festival Inovasi BIA 2026 yang digelar selama dua hari, 8-9 September 2026 di Grand Ballroom Gedung Startup Center, STP IPB, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah. Lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan. Gedung Startup Center adalah simbol kolaborasi kampus dan industri. Tempat yang tepat untuk menyulut ide.

Festival dibuka resmi oleh Wali Kota Dr. H. Dedie A. Rachim, M.A. Dalam dua hari itu, suasana festival sangat hidup. Lebih dari 2.486 pengunjung datang silih berganti, dari pelajar, mahasiswa, ASN, hingga masyarakat umum.

Pameran 63 Inovasi: Pengunjung bisa melihat langsung beragam solusi. Ada sistem pengelolaan sampah berbasis IoT karya pelajar SMK, aplikasi layanan aduan warga terintegrasi dari OPD, inovasi pangan lokal, hingga alat bantu difabel karya mahasiswa.

Semua inovasi mencakup 10 bidang inovasi Energi Terbarukan, Pangan dan Agribisnis, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Air Minum, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Transportasi Ramah Lingkungan, Pendidikan, Kerajinan Rumah Tangga, Sosial, Ekonomi Hijau, Kesehatan dan Obat-obatan.

Dalam sambutannya, Kepala Bapperida Kota Bogor, Anne Dewiana Rilianti menegaskan arah baru BIA "Kami ingin menunjukkan bahwa Bogor tidak kekurangan ide. Lewat pameran ini, kami berharap lahir kolaborasi nyata.

Inovasi yang tadinya hanya *prototype* bisa diadopsi OPD dan direplikasi untuk melayani masyarakat. Target utama kita adalah hilirisasi. "Hilirisasi menjadi kata kunci.

Tahun ini, BAPPERIDA menargetkan minimal 10 inovasi menjadi pilot project di perangkat daerah pada tahun 2027. Inovasi-inovasi tersebut juga akan diusulkan untuk mengisi dan mendongkrak Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bogor, yang menjadi indikator nasional.



DAFTAR PEMENANG LOMBA INOVASI - BOGOR INNOVATION AWARD (BIA) 2026

ASN Pemerintah Kota Bogor

Juara 1	Gerobak Sae Pisan (Gerakan Bogor Bebas Kumuh Strategi Akselerasi Permukiman Indah, Sehat, Aman dan Nyaman)	Dinas Perumahan dan Permukiman
Juara 2	SI-ANTIK (Sistem Informasi Juru Pemantau Jentik)	UPTD Puskesmas Belong
Juara 3	SEHATTI	UPTD Puskesmas Mekarwangi
Juara Harapan 1	Halo Libra (Library Assistant)	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Juara Harapan 2	PAK DEDI KASEV	UPTD Puskesmas Mekarwangi
Juara Harapan 3	SIPROKSI (Sistem Informasi Pengendalian Proyek Konstruksi) V.5.0	Dinas Perumahan dan Permukiman

Masyarakat

Juara 1	Bogor Snack Revolution	Masyarakat
Juara 2	YES (Yasmin Eco Sirkular)	Masyarakat
Juara 3	Bogor Hub - AI Public Service Automation Platform	Masyarakat
Juara Harapan 1	ECO LAKEBIN	Masyarakat
Juara Harapan 2	Smart Infus Monitoring System	Masyarakat

Perguruan Tinggi/Lembaga/Pelaku Usaha

Juara 1	MULYVERSE (Mulyaharja Metaverse Smart Tourism Ecosystem): Platform Desa Wisata Digital Berbasis Website, Virtual Reality, Augmented Reality untuk Peningkatan Ekonomi Lokal	IPB University
Juara 2	Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga dan Usaha (Food/Agriculture Waste) 'Biji Alpukat' Sebagai Bahan Baku Fashion Batik & Kriya Berkelanjutan oleh Batikorganik dan KUB Tumbuh di Cipaku Bogor Selatan.	Masyarakat
Juara 3	MBG Insight: Estimasi Nutrisi dan Pemantauan MBG Berbasis Deep Learning	Universitas Pakuan
Juara Harapan 1	MONOCARE AR: Media Edukasi Sistem Pernapasan Berbasis Permainan dan Teknologi Augmented Reality	Universitas Pakuan
Juara Harapan 2	SMARTBOM: Sistem Manajemen Stok Bahan Baku Terintegrasi Bill of Materials(BOM)	Universitas Bina Sarana Informatika

Pelajar SMA/SMK/MA/ sederajat

Juara 1	SaBo - Saba Bogor: Membangkitkan Warisan Bogor Melalui Gamifikasi & Kolaborasi Kreator Lokal.	Sekolah Cendekia BAZNAS
Juara 2	Kr4batKompos Sistem Mesin Kompos Kering Berbasis IoT Untuk Pengelolaan Sisa Makanan Program MBG di Sekolah	SMK Negeri 4 Kota Bogor
Juara 3	PENAMBAH CITA RASA ALAMI KOMBINASI KULIT NANAS DAN KULIT PUTIH DURIAN KAYA AKAN SERAT (P'DAY TASTE)	SMA PGRI 1 Kota Bogor
Juara Harapan 1	Si-Uncal (Sistem Unit Navigasi & Catatan Anomali Lintasan)	SMK Wikrama
Juara Harapan 2	KRABAT ISYARAT INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA BOGOR	SMK Negeri 4 Kota Bogor
Juara Harapan 3	ALLIUM-LEATHER: Inovasi Eco-Friendly Bio-Leather Berbasis Kulit Bawang Merah Sebagai Bahan Baku Sustainable Fashion	SMA Dian Harapan Bogor

Pelajar SMP/MTs/ sederajat

Juara 1	CEREBINABI (Cereal Biji Nangka dan Bioplastik)	SMP Negeri 1 Kota Bogor
Juara 2	PELITA (OPTIMALISASI LIMBAH PASAR MENJADI PAKAN LELE MANDIRI)	SMP Negeri 4 Kota Bogor
Juara 3	DRAGON KISS - Lip Balm Remaja Berbahan Aktif Antioksidan dan Antimikroba dari Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus)	SMP Negeri 1 Kota Bogor
Juara Harapan 1	PISOPA: Pirolisis Sampah Organik Penghasil Biochar dan Pestisida Alami	SMP Negeri 1 Kota Bogor
Juara Harapan 2	Fe-licious	SMP Negeri 4 Kota Bogor
Juara Harapan 3	TANJUNG BIO-CLEAR (TBC), sampo anti ketombe	SMA Negeri 3 Kota Bogor

BAB 5: BIA TIDAK HANYA INOVASI, TAPI JUGA BAKAT

Seperti sebelumnya BIA 2026 kembali menyelenggarakan Kompetisi Bakat (Talent Competition) sebagai wujud Bogor sebagai kota kreatif: “Kota yang maju bukan hanya cerdas secara teknologi, tapi juga kaya budaya dan kreatif. Kompetisi ini adalah panggung bagi anak-anak muda Bogor untuk SPARK YOUR TALENT.” Ada 5 kategori yang dilombakan: Fotografi bertema “Bogor Berinovasi”, Menyanyi Solo, Tari Tradisional, Tari Modern, dan Cosplay. Animo luar biasa dari pelajar dan mahasiswa Kota Bogor, sampai dengan penutupan terdapat 122 peserta dari berbagai sekolah, sanggar, dan komunitas se-Kota Bogor mengikuti seleksi. Mereka tampil di panggung utama festival, membuat festival tidak hanya berisi pameran serius, tapi juga penuh warna dan energi muda.

DAFTAR PEMENANG LOMBA KOMPETISI BAKAT - BOGOR INNOVATION AWARD (BIA) 2026

Lomba Cosplay		
Juara 1	Diandra Verel Amerdy	SMA Negeri 7 Bogor
Juara 2	Nur Rochmah Irianti	Universitas Terbuka
Juara 3	Bisma Novadh Alfarizqi	SMP Negeri 4 Bogor
Lomba Fotografi		
Juara 1	Muhammad Zaki Naufal Hidayat	SMK Pembangunan Bogor
Juara 2	Resya Haryani	SMK Pembangunan Bogor
Juara 3	Azhar Septian	SMK Pembangunan Bogor
Lomba Menyanyi		
Juara 1	Brenda Kolose Sinaga	SMA Negeri 8 Bogor
Juara 2	Kiara Valentina Farnov	SMP Negeri 4 Bogor
Juara 3	Syakira Rafah Taqiyyah	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Lomba Tari Modern		
Juara 1	Odd Spice	SMP - SMA Kota Bogor
Juara 2	Kanaya Lathisya Salsabila	SMP Negeri 19 Bogor
Juara 3	Edrea Rahmadhisa Gunawan	SMP Pesat Bogor
Lomba Tari Tradisional		
Juara 1	Starp4T	SMP Negeri 4 Bogor
Juara 2	Duo Srikandi	SMP Negeri 1 Bogor
Juara 3	Afiqa Myesha, dkk.	SMP Negeri 7 Bogor

BAB 6: PENUTUP DAN APA SELANJUTNYA?

Festival ditutup pada 9 September sore dengan Malam Anugerah BIA 2026. Wali Kota bersama jajaran Forkopimda menyerahkan penghargaan kepada para pemenang dari tiap kategori inovasi dan bakat. Namun, bagi panitia, penutupan festival bukan akhir. Justru ini awal dari pekerjaan yang lebih besar. Empat agenda tindak lanjut telah disiapkan:

1. Hilirisasi dan Replikasi: 10 inovasi terpilih akan didampingi untuk diuji coba di OPD terkait, untuk tahap awal akan dilakukan pertemuan antara innovator dengan perangkat daerah.
2. Fasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual, semua peserta berhak untuk difasilitasi sertifikasi HKI setelah lolos assessment yang akan dilakukan oleh Manajemen Kekayaan Intelektual BRIN akan dilakukan pendampingan untuk pengajuan Sertifikasi HKI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkum.
3. Diseminasi inovasi melalui Buletin Pembangunan Daerah dan Webinar ThinkLab : Eksplorasi Riset dan Inovasi.
4. BIA 2027 yang Lebih Besar: Wali Kota Dedie A. Rachim dalam penutupan mengumumkan bahwa BIA 2027 akan menambah kategori baru untuk menjawab tantangan masa depan.

BIA 2026 telah selesai. Dari kick off di bulan April yang dihadiri 300 orang, menjadi gerakan yang melibatkan 373 pendaftar, 184 inovator terbina, 8-9 September 63 karya dipamerkan, 122 talenta muda tampil dan 2.486 warga yang datang merasakan langsung.

Ini bukti bahwa ketika ide disulut dan dikolaborasikan, ia tidak akan pernah padam.

“SPARK YOUR IDEA: Innovation and Collaboration Empowering The Future”.

Sampai jumpa di Bogor Innovation Award 2027.



Acara pembukaan Festival Inovasi BIA 2026.



Peserta lomba tari tradisional pada BIA 2026.



Peserta lomba menyanyi pada BIA 2026.



Peserta lomba cosplay pada BIA 2026.

Pengertian

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(UU No.14 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 2)

Tahukah Kamu ???

Setiap tahun, Komisi Informasi Pusat mengadakan penilaian & pemberian penghargaan kepada badan publik yang paling informatif. Hal ini mendorong badan publik semakin transparan kepada masyarakat loh!

Informasi Publik

Kategori Informasi Publik

Secara substansi, kategori informasi publik yang dimiliki badan publik dan diatur UU No.14 Tahun 2008 meliputi:

1

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala



2

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara Serta Merta



3

Informasi Publik yang wajib tersedia Setiap Saat



4

Informasi Publik yang Dikecualikan



DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008**
tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010**
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Komisi Informasi No. 1 / 2021**
tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017**
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 5 Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2022**
tentang standar layanan informasi publik

Standar Pelayanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi

PERSYARATAN PELAYANAN

- 1** Pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web ppidkotabogor.go.id.
- 2** Persyaratan administrasi: menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan; atau;
- 3** Menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga



Prosedur Pelayanan

Sistematika prosedur pelayanan:

1

Pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui situs web bapperida.kotabogor.go.id/permohonan-informasi



2

Petugas pelayanan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID



3

Ditanggapi permohonan informasi 10 hari + 7 hari kerja

Pemohon mengajukan berkas yang akan diverifikasi oleh petugas PPID. Setelah verifikasi, data yang dibutuhkan dicari dan diolah untuk kemudian disusun menjadi jawaban. Surat jawaban diserahkan paling lambat 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja jika PPID belum menguasai informasi yang diminta.



BIAYA

GRATIS

Tanpa dipungut Biaya



WAKTU PELAYANAN

Senin–Kamis
07.30 - 15.30 WIB

Istirahat
12.00 - 13.00 WIB

Khusus Jumat
07.30 - 16.00 WIB

Istirahat
11.30 - 13.00 WIB



JAMINAN PELAYANAN

Terlayannya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008



www.bapperida.kotabogor.go.id



@bapperida.kotabogor

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Prosedur Pelayanan Informasi Publik



LAYANAN PERMOHONAN **DATA & INFORMASI** ke Bapperida Kota Bogor

SCAN DISINI



<https://bit.ly/req-data-bapperida>



**DATA
AKURAT**

Sumber resmi
dan terpercaya



**PELAYANAN
MUDAH**

Proses cepat
dan transparan



**AMAN &
TERJAMIN**

Data terjaga
kerahasiaannya



**LAYANAN
RESPONSIF**

Siap melayani
kebutuhan Anda



www.bapperida.kotabogor.go.id



[@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

BAPPERIDA KOTA BOGOR

— TRIWULAN I TAHUN 2026 —

96,45

**PREDIKAT
“SANGAT BAIK”**

**NO
CORRUPTION**

**STOP
CORRUPTION**



INTEGRITAS

Menjunjung tinggi kejujuran dan etika.



TRANSPARAN

Terbuka dalam setiap proses dan informasi.



AKUNTABEL

Bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan.



MELAYANI

Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.



www.bapperida.kotabogor.go.id



[@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

BAPPERIDA KOTA BOGOR

— TRIWULAN I TAHUN 2026 —

PREDIKAT

“SANGAT BAIK”

HASIL SPAK



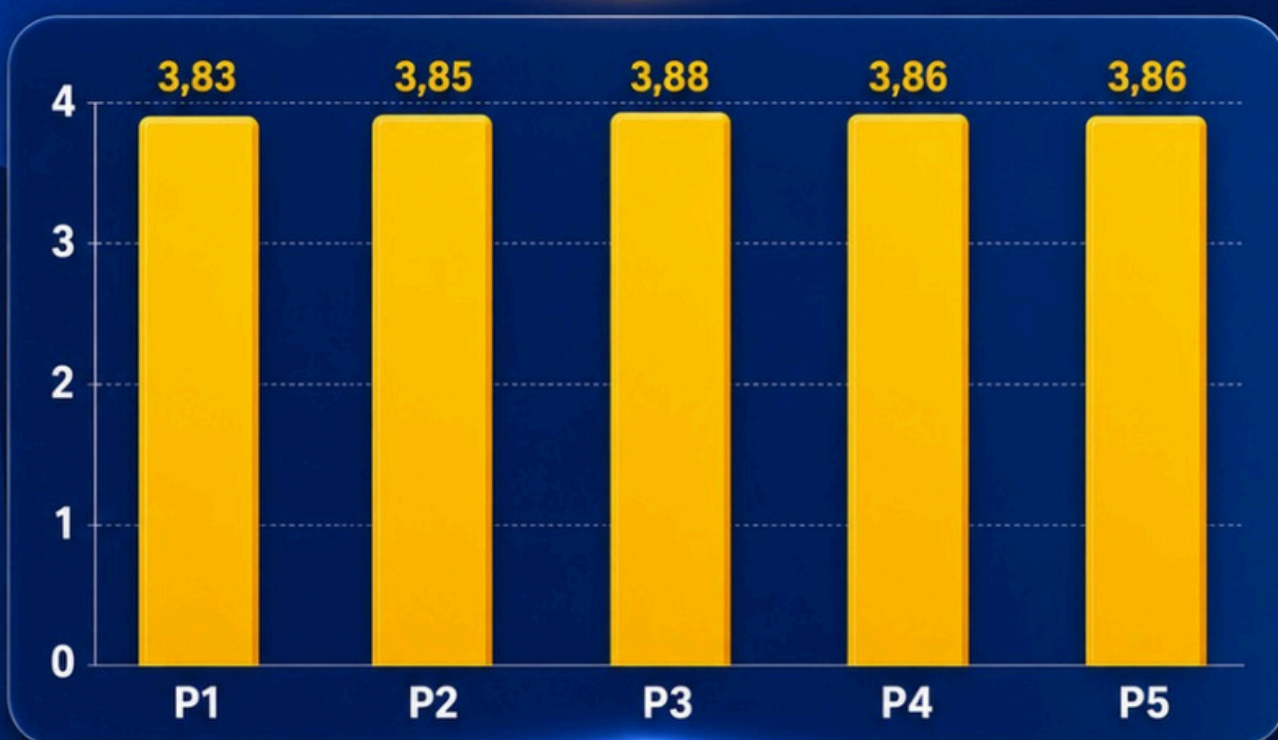
INDEKS SPAK



**JUMLAH
RESPONDEN**

148

HASIL INDEKS PER-INDIKATOR PENILAIAN SPAK BAPPERIDA



P1 : Ada/Tidaknya Diskriminasi Layanan

P2 : Ada/Tidaknya Layanan Diluar Prosedur

P3 : Ada/Tidaknya Imbalan Uang/Barang/Fasilitas di Luar Ketentuan

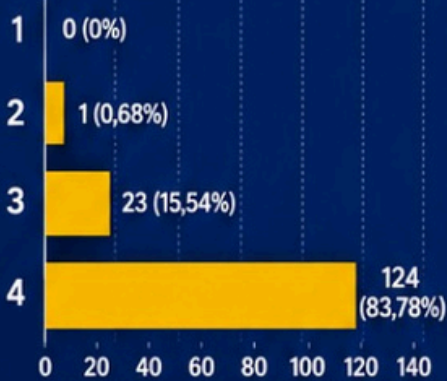
P4 : Ada/Tidaknya Pungutan Liar

P5 : Ada/Tidaknya Percaloan

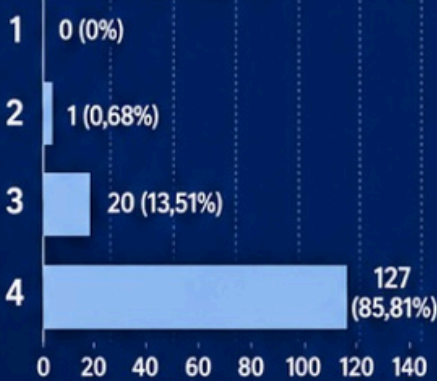
DETAIL HASIL INDEKS PER-INDIKATOR SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI



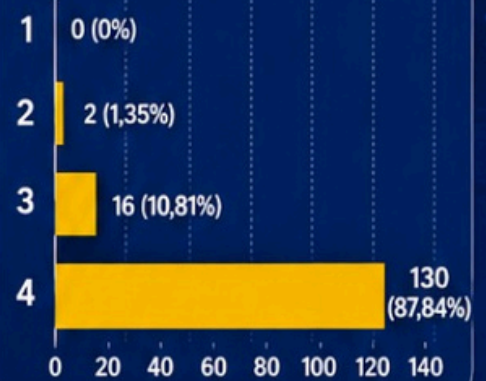
ADA/TIDAKNYA DISKRIMINASI LAYANAN



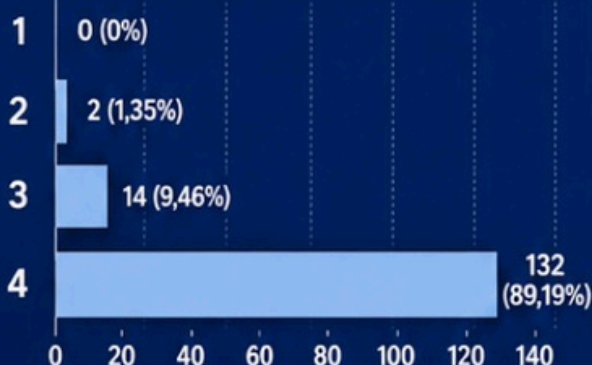
ADA/TIDAKNYA LAYANAN DILUAR PROSEDUR



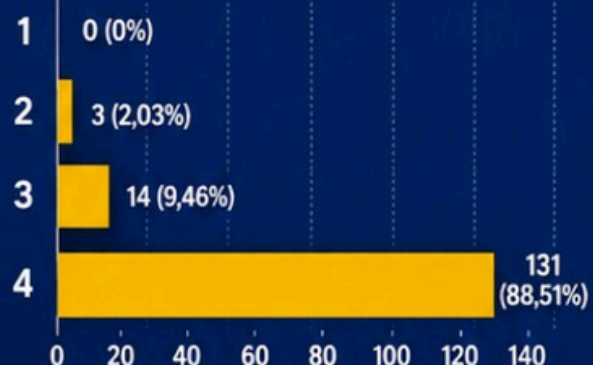
ADA/TIDAKNYA PUNGUTAN LIAR



ADA/TIDAKNYA IMBALAN UANG/BARANG/FASILITAS DI LUAR KETENTUAN



ADA/TIDAKNYA PERCALOAN



*Bobot : 1 - 4



*Jumlah Responden :
148 Orang

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT ke Bapperida Kota Bogor

SCAN DISINI



<https://bit.ly/pengaduan-bapperida>



RESPON CEPAT

Setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat



MUDAH & PRAKTIS

Sampaikan laporan kapan saja dan di mana saja



DATA AMAN & TERJAMIN

Kerahasiaan data pelapor selalu terjaga



BOGOR LEBIH BAIK

Partisipasi Anda mewujudkan Bogor yang maju



www.bapperida.kotabogor.go.id



@bapperida.kotabogor

”

**Sudahkah ruang-
ruang kreatif di sekitar
lingkungan Anda di
Kota Bogor
memfasilitasi ide-ide
cemerlang Anda
selama ini?**

IRMA ARLINI DEWI, S.T.P., M.SC. (BAPPERIDA KOTA BOGOR)



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telepon: (0251) 8338052 | Website: <http://bapperida.kotabogor.go.id> | Email: bapperida@kotabogor.go.id | Instagram: [@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)